

ETIKA PUBLIK

KONSEP ISI MODUL ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN

Wahyudi Kumorotomo
Nana Rukmana D.W.
Amir Imbaruddin

Tim Penyusun Modul Etika Publik

SUB MATERI POKOK

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik	<ol style="list-style-type: none">1) Pengertian dan Fungsi Etika2) Pengertian Kode Etik3) Kode Etik Aparatur Sipil Negara4) Nilai-nilai Etika Publik5) Definisi dan Lingkup Etika Publik6) Dimensi Etika Publik7) Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi
2. Bentuk-Bentuk Kode Etik dan Implikasinya	<ol style="list-style-type: none">1) Tantangan Dalam Internalisasi Kode Etik ASN2) Berbagai Bentuk Kode Etik3) Internalisasi Kode Etik Bagi Para Pejabat Publik4) Pilihan Etis dalam Internalisasi Etika Publik5) Integrasi Kode Etik Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan
3. Aktualisasi Kode Etik PNS	<ol style="list-style-type: none">1) Etika Publik dan Pelayanan Publik2) Aktualisasi Kode Etik Publik Untuk Melawan Korupsi3) Aktualisasi Kode Etik Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi4) Aktualisasi Kode Etik Untuk Peningkatan Integritas Publik
5/30/14	.

KEGIATAN BELAJAR (KB)

1. KODE ETIK DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK

- 1) Pengertian dan Fungsi Etika
- 2) Pengertian Kode Etik
- 3) Kode Etik Aparatur Sipil Negara
- 4) Nilai-nilai Etika Publik
- 5) Definisi dan Lingkup Etika Publik
- 6) Dimensi Etika Publik
- 7) Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

2. BENTUK-BENTUK KODE ETIK DAN IMPLIKASINYA

- 1) Tantangan Dalam Internalisasi Kode Etik ASN
- 2) Berbagai Bentuk Kode Etik
- 3) Internalisasi Kode Etik Bagi Para Pejabat Publik
- 4) Pilihan Etis dalam Internalisasi Etika Publik
- 5) Integrasi Kode Etik Dalam Pelaksanaan

3. AKTUALISASI KODE ETIKA ASN

- 1) Etika Publik dan Pelayanan Publik
- 2) Aktualisasi Kode Etika Publik Untuk Melawan Korupsi
- 3) Aktualisas Kode Etik Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi
- 4) Aktualisasi Kode Etik Untuk Peningkatan Integritas Publik

BEBERAPA PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA

PENGERTIAN

MORAL (asal kata “MORES”), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat.

ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan.

ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja atau suatu profesi.

PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial.

PERILAKU ETIS, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan.

FUNGSI ETIKA

**SEBAGAI UKURAN BAIK-BURUK, WAJAR-TIDAK WAJAR, & BENAR-SALAH
LANDASAN BERTINDAK DALAM SEBUAH KEHIDUPAN KOLEKTIF YANG
PROFESIONAL
UNTUK MENJALANKAN VISI DAN MISI LEMBAGA / INSTITUSI
UNTUK MENJAGA CITRA LEMBAGA / INSTITUSI**

ARTI PENTING ETIKA DALAM ORGANISASI

PENGERTIAN ETIKA

Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi.

ALASAN DIPERLUKANNYA ETIKA

- Etika berkaitan dengan **perilaku manusia**
- Etika memberikan **prinsip** yang kokoh dalam **berperilaku**
- Adanya **dinamika manusia** dengan segala konsekuensinya
- Etika berkaitan erat dengan **sistem nilai manusia**

MANFAAT ETIKA DALAM ORGANISASI

- Kebersamaan
- Empati
- Kepedulian
- Kedewasaan

- Orientasi Organisasi
- Respect*
- Kebajikan
- Integritas

- Inovatif
- Keunggulan
- Keluwesannya
- Kearifan

Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28):

- PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.
- PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil serta mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab.
- PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja, sumpah jabatan, dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3)

Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut

(Douglas dlm Kumorotomo, 1992, 345-346)

- Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan
- Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan.
- Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah.
- Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak.
- Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan)

DEFINISI ETIKA PUBLIK

ETIKA PUBLIK

Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/ buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik

3 FOKUS

1. **Pelayanan publik** yang **berkualitas** dan **relevan**
2. Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai **bantuan** dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan **alat evaluasi**.
3. **Modalitas Etika**, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual

POLITICAL SOCIETY

CIVIL SOCIETY

DIMENSI ETIKA PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK YANG
BERKUALITAS DAN RELEVAN



MODALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
NETRALITAS

TINDAKAN
INTEGRITAS
PUBLIK

Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011

TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI

Pengetahuan ttg hukum
Manajemen program
Manajemen Strategis
Manajemen Sumber Daya

KOMPETENSI TEKNIS



**ETIKA
PUBLIK**

KOMPETENSI ETIKA

Manajemen Nilai
Kemampuan penalaran moral
Moralitas peribadi
Etika Organisasional

KOMPETENSI LEADERSHIP

Penilaian dan Penetapan Tujuan
Ketrampilan Manajemen
Gaya Manajemen
Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi

5/30/14

DIMENSI ETIKA PUBLIK

ETIKA POLITIK



- POLICY/TUJUAN
- POLITY/SARANA
- POLITICS/AKSI POLITIK

**PELAYANAN PUBLIK
YANG BERKUALITAS
DAN RELEVAN**

TUJUAN

**ETIKA
PUBLIK**

**TINDAKAN
INTEGRITAS
PUBLIK**

**MODALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
NETRALITAS**

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN ETIKA PUBLIK

- 1. KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN**
- 2. PEJABAT PUBLIK DAN DILEMA ETIKA**
- 3. INTEGRASI NILAI - NILAI ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**
- 4. LOGIKA PASAR YANG BER-PENGARUH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

ETIKA PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penekanan nilai dan norma, serta prinsip moral, maka etika publik membentuk integritas pelayanan publik
- Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik
- Etika publik mengarahkan analisa Palsosbud dalam perspektif pencarian sistematis bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik.

REFLEKSI :

- $SEP = f (V + N + M) - C$
- SEP = Standard Etika Publik
- F = fungsi
- V = value (nilai)
- N = norma
- M = moral
- C = corruption (korupsi)

METODE PEMBELAJARAN



Mata diklat disajikan secara interaktif dengan metode :

1. **CERAMAH** → Peserta diminta mendengar ceramah ;
2. **Film Pendek** → Peserta diminta menonton film pendek, kemudian diminta mengomentasi dan mendiskusikannya
3. **Diskusi** → Peserta mendiskusikan pentingnya integritas yang harus dimiliki Pemimpin Pembaharuan.
4. **STUDI KASUS:** Peserta diminta mendiskusikan kasus-kasus aktual.
4. **VISITASI** → Peserta Berkunjung Ke Tempat yang Dapat Membantu Proses Internalisasi Hasil Belajar.
4. **Aktualisasi** → Peserta diminta untuk menghasilkan suatu **produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas**

Sumber Rujukan Kode Etik

- **UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN**
- **PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS**
- **PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**
- **PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil**
- **PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang**

Prasyarat Manajemen Kinerja

1. **Komitmen**; seluruh elemen harus punya komitmen kuat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran manajemen kinerja
2. **Sinergi**; penting untuk mengutamakan keterkaitan dan keseimbangan seluruh satuan kerja dan individu
3. **Komunikasi**; mendorong sinergi dan pertukaran pengetahuan → TI
4. **Koordinasi**; merupakan inti dari upaya menciptakan sinergi
5. **Budaya Kinerja**; bentuk aktual dari nilai yang melahirkan kinerja
6. **Imbalan dan hukuman** (reward & punishment); merupakan instrumen untuk memacu kinerja
7. **Konsistensi**; kinerja memerlukan internalisasi budaya organisasi dalam gagasan maupun praktik
8. **Kode etik**; pedoman bersikap, bertingkah laku dan bertindak
9. **Keberlanjutan**; kinerja selalu diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus.

Sumber Inspirasi Etos Kerja

Agama

- Semua agama mengajarkan disiplin & kerja keras (“Protestant ethic”, “Jihad”, “dharma”)
- Mengapa “credo” dari agama tidak membekas?

Local wisdom

- Tiap bangsa punya nilai (“jisei” di Jepang, “pengabdian” di Indonesia, “work hard play hard” di Amerika, “cho” di Cina)
- Apa yg harus dibudayakan di Indonesia?

Kepe-mimpin-an

- Budaya kinerja memerlukan pemimpin organisasi yang baik
- Teladan sangat penting dalam masyarakat yang masih paternalistik

Peng-awasan

- Sistem pengawasan formal vs. material
- Penilaian kinerja bukan terbatas pada kelompok dan organisasi, tetapi juga individual.

Belajar dari Etos Kerja orang Jepang

13 Good Traits of Japan's Business Culture

1. Company over Family (bad and good)
2. Consistency
3. Determination
4. Hard working
5. Harmony
6. Honor
7. Loyalty
8. Manners
9. Pride
10. Respect
11. Strong Bond
12. Team Players
13. Willingness

Gagasan Pokok dalam PP No.53/2010 ttg Disiplin PNS

1. Tujuan: mewujudkan PNS yg handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yg menerapkan prinsip pemerintahan yg baik (good governance)
2. PP No.30/1980 ttg Disiplin PNS tidak sesuai lagi dg kebutuhan & perkembangan saat ini; merinci 26 kewajiban dan 18 larangan, tetapi tidak menjelaskan ttg bagaimana peraturan disiplin diterapkan dan sistem sanksinya.
3. Penerapan ps.30 dari UU No.43/1999 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Bagaimana dengan perubahan dalam UU No.5 th 2014 ttg ASN?
4. Kebutuhan mendesak agar PNS lebih produktif, dengan sistem karir dan penilaian kinerja yg jelas.

Arah Kebijakan PP 53/2010

- Rincian ttg **17 kewajiban** (ps.3) dan **15 larangan** (ps.4) lebih rinci dengan kriteria yg lebih objektif.
- Ketentuan ttg tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yg rinci. (Mis: ps.10, hukuman disiplin berat jika sasaran kerja kurang dr 25%).
- Struktur kewenangan dr pejabat yg berhak menetapkan hukuman disiplin lebih jelas; setiap jenjang pejabat punya kewenangan disiplin.
- Pegawai yg memperoleh ancaman tindakan disiplin berhak membela diri, melakukan klarifikasi, dan mengajukan banding.
- Ketentuan ttg mekanisme, prosedur dan dokumentasi penjatuhan hukuman disiplin lebih jelas dan mudah dipahami.

Penggunaan Sumber Daya Publik

- Mendagri melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik
- 25 pemerintah daerah mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik
- LBH Keadilan melakukan somasi terhadap 25 pemerintah daerah yang mengizinkan penggunaan mobil dinas

Tidak Jujur (Presensi Sidik Jari)

- **Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov NTB menandatangani daftar hadir hingga satu bulan penuh ke depan. Padahal jelas-jelas PNS tersebut tidak masuk kantor alias bolos.**
- **Ada juga pegawai yang terlalu kreatif seperti cara titip absen sama teman atau absen bergilir dan saling absenkan.**
- **Untuk itu, penerapan sistem absensi dengan menggunakan sidik jari merupakan upaya menumbuhkan kesadaran disiplin dikalangan PNS, khususnya mematuhi ketentuan jam masuk dan pulang kantor.**

Nepotisme Rekrutmen Honorer

- **Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan masih banyak melihat pengangkatan pegawai honorer diwarnai oleh nepotisme.**
- **Ini menjadi salah satu faktor yang membuat sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan birokrasi Indonesia masih bermasalah.**
- **Selama ini pemda mengusulkan formasi perekrutan PNS dari honorer, bukan semata mata kebutuhan. Misalnya guru honorer itu orang dekat yang dimasukkan.**
- **Jadinya sekarang kita kekurangan orang yang kita butuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan.**

Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan

- Sebagai kepala Dinas Kesehatan di salah satu kabupaten yang cukup jauh letaknya dari ibukota provinsi, dr. X MPH, selalu merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pengadaan obat-obatan untuk seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di kabupaten tersebut.
- Oleh karena itu, dr. X MPH memutuskan untuk membuka apotik atas nama istrinya dan anaknya yang kuliah di fakultas kedokteran.
- Selanjutnya, pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan seluruh Puskesmas di kabupaten itu harus dibeli dari apotik milik istri dan anak dr. X MPH.

Terpidana Korupsi Dipromosi

- Sembilan mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat di pemerintahan daerah.
- Mendagri mengatakan akan menginventarisasi para pejabat daerah yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi namun kini bebas dan kembali aktif sebagai PNS, bahkan menempati jabatan fungsional dan structural.
- Pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Bintan yang dihukum 2,5 tahun.
- Azirwan kemudian mengundurkan diri karena mendapat banyak sorotan media. Gamawan mengatakan sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar dari pengangkatan Azirwan karena yang mendapat hukuman di bawah empat tahun, masih bisa aktif sebagai PNS.

Pengunduran Diri Pejabat

- **PM Korsel, Chung Hong-won, Minggu (27/4/2014), mengundurkan diri dari jabatannya terkait tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang mengakibatkan ratusan orang penumpangnya tewas. "Saya meminta maaf karena tak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesudah tragedi ini terjadi," kata Hong-won.**
- **"Saya yakin, sebagai perdana menteri, saya harus menanggung tanggung jawab ini dan mengundurkan diri," tambah dia. "Sejak awal saya sudah berniat mengundurkan diri namun menangani situasi ini menjadi prioritas utama dan saya harus membantu sebelum mengundurkan diri," ujar dia. "Namun, kini saya memutuskan untuk mundur agar diri saya tidak menjadi beban lagi untuk pemerintah," Hong-won menegaskan.**
- **Kapal feri Sewol yang berbobot 6.825 ton tenggelam pada 16 April lalu dalam perjalanan dari pulau wisata Jeju menuju kota Incheon, di sebelah barat Seoul. Sejauh ini, sebanyak 180 orang -sebagian besar pelajar yang melakukan kunjungan lapangan- dipastikan tewas dan 110 orang lainnya masih dinyatakan hilang.**

Perbuatan Tercela: PNS Narkoba

- **Satuan narkoba Polres Palopo, menangkap satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Luwu Utara, sebagai bandar narkoba di Palopo.**
- **Kasat narkoba Palopo, AKP. Ade Chris Manapa, mengatakan tersangka GP (30) adalah PNS di satuan Pamong Praja Luwu Utara dan ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur kota Palopo.**
- **Ade menambahkan bahwa GP ditangkap saat ia akan melakukan transaksi di Palopo.**
- **Beberapa barang bukti yang berhasil disita seperti satu paket sabu-sabu, dua lembar saset kosong dan satu buah timbangan.**

Whistle-blower vs. Membocorkan Rahasia

- **EW, PNS di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, secara mendadak dipindahtugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan pemindahan itu karena EW dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan Pusat Informasi Majapahit kepada dunia luar.**
- **EW mengatakan ia pasrah dengan keputusan atasannya tersebut. "SK pemindahan sudah saya terima dan saya siap melaksanakan tugas di tempat baru meski harus pindah 140 kilometer jauhnya dari rumah secara tiba-tiba," ujarnya. EW menambahkan bawa "Alasan pemindahan saya disampaikan di depan banyak orang saat apel pagi. Bahkan, banyak masalah pribadi dibeberkan di hadapan banyak orang, tetapi saya terima saja karena saya yakin yang saya lakukan tidak salah"**
- **Pemindahan EW ini berkaitan dengan merebaknya polemik di sekitar pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan situs purbakala Segaran III dan IV di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan PIM, yang merupakan tahap awal dari pembangunan Majapahit Park, itu dilakukan sejak 22 November 2008 dan telah merusak situs purbakala bekas ibu kota Kerajaan Majapahit di bawahnya.**



**Thank
You**